

ABSTRAK

Mety Rahmawati (NPM 01657210022)

FORMULASI SANKSI PIDANA YANG IDEAL DALAM REGULASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Peningkatan penggunaan internet di berbagai bidang telah menimbulkan ancaman terhadap keamanan data pribadi. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), hingga saat ini belum dilengkapi dengan Peraturan Pelaksana yang mengatur aspek teknis pelindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan mengkaji latar belakang pembentukan UU PDP, dan pengaturan sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan kebocoran dan penggunaan data pribadi secara ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Komparatif. Adapun teori hukum yang dijadikan sebagai pisau analisis meliputi teori tujuan hukum, teori perlindungan hukum dan teori hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pribadi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, sehingga jenis delik yang digunakan adalah delik aduan, khususnya delik aduan relatif. Artinya, korban yang merasa dirugikan berhak untuk melaporkan dengan membuktikan adanya kerugian yang diderita baik *materil* maupun *immateril* dari perbuatan pelaku. Untuk itu, perlu ditegaskan ketentuan mengenai delik aduan relatif (*Klacht Delict*) tersebut dan kemungkinan untuk menerapkan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*) sebagai upaya alternatif penyelesaian perkara secara damai dan pemulihan harmoni kehidupan seperti semula, yang pasti pengaturan sanksi pidana dalam UU PDP bersifat *ultimum remedium*. Artinya, sanksi pidana hanya sebagai sarana terakhir dalam penerapan UU PDP.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelindungan Data Pribadi, Formulasi Sanksi Pidana

ABSTRACT

Mety Rahmawati (NPM 01657210022)

FORMULATION OF IDEAL CRIMINAL SANCTIONS IN THE REGULATION OF PERSONAL DATA PROTECTION

The increase in internet usage across various sectors has engendered threats to the security of personal data. The Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) currently lacks implementing regulations that govern the technical aspects of personal data protection. This research aims to examine the background of the establishment of the PDP Law and the regulation of criminal sanctions as a means to combat data breaches and the illegal use of personal data. The research employs a normative legal method utilizing Legislative, Conceptual, and Comparative Approaches. The legal theories applied as analytical tools include the theory of legal purposes, the theory of legal protection, and the theory of progressive law. The findings indicate that personal data constitutes a component of Human Rights that must be protected; thus, the type of offense applicable is a complaint offense, specifically a relative complaint offense. This implies that victims who feel aggrieved are entitled to report by demonstrating the existence of both material and immaterial losses incurred due to the perpetrator's actions. Therefore, it is essential to clarify the provisions regarding relative complaint offenses (Klacht Delict) and the potential application of restorative justice as an alternative dispute resolution mechanism aimed at peacefully restoring harmony in life, with the understanding that criminal sanctions under the PDP Law serve as ultimum remedium. This denotes that criminal sanctions are intended solely as a last resort in the enforcement of the PDP Law.

Keywords: *Legal Protection, Personal Data Protection, Formulation of Criminal Sanctions*